

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Umum 2024, menjadi momentum penting dalam dinamika politik Indonesia, terutama bagi partai politik yang berjuang untuk tetap relevan di tengah persaingan yang semakin ketat. Salah satu isu strategis yang mencuat adalah kegagalan beberapa partai politik dalam memenuhi ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) sebesar 4%, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Partai Persatuan Pembangunan (PPP), salah satu partai politik tertua di Indonesia dengan basis dukungan tradisional yang kuat, menghadapi tantangan serius dalam mempertahankan eksistensinya. Kegagalan PPP untuk lolos ambang batas parlemen pada Pemilu 2024 tidak hanya berdampak pada hilangnya representasi partai di parlemen nasional, tetapi juga memunculkan pertanyaan mendalam mengenai strategi politik dan kemampuan adaptasi partai ini dalam menghadapi perubahan perilaku pemilih (Anugrah, 2020).

Secara empiris, realitas ini tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor, seperti lemahnya mobilisasi basis pemilih, ketidakefektifan kampanye, perpecahan internal partai, serta kurang relevannya program dan isu yang diangkat dalam memenuhi harapan masyarakat. Kegagalan ini semakin mencolok di tengah persaingan politik yang semakin ketat dengan partai-partai lain yang lebih inovatif dalam memanfaatkan teknologi, komunikasi politik, dan strategi kampanye. Situasi ini mengisyaratkan adanya kebutuhan mendesak bagi PPP untuk merumuskan kembali strategi politiknya agar dapat bertahan dalam lanskap politik yang terus berubah (Suwarso, 1999).

Provinsi Jawa Barat dipilih sebagai lokus penelitian ini karena memiliki signifikansi strategis dalam peta politik nasional. Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, sekitar 50,34 juta jiwa pada tahun 2023 (BPS, 2025), yang menjadikannya lumbung suara potensial dalam setiap

kontestasi politik. Selain itu, Jawa Barat memiliki karakteristik pemilih yang beragam, baik dari segi demografi, etnisitas, maupun preferensi politik, sehingga mencerminkan miniatur kompleksitas pemilih nasional. Pada Pemilu 2019, provinsi ini memiliki sejarah panjang sebagai basis suara umat Islam, segmen yang menjadi target utama PPP. Hal ini menunjukkan adanya ketidakselarasan antara strategi politik PPP dan aspirasi masyarakat Jawa Barat, yang memerlukan analisis mendalam untuk memahami akar permasalahan dan merumuskan rencana aksi yang relevan. Penelitian ini penting untuk memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam mengeksplorasi faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan PPP di Jawa Barat serta merumuskan strategi yang dapat membantu partai dalam merevitalisasi dukungannya (Rahat, Hazan, 2001). Dengan fokus pada Jawa Barat sebagai provinsi strategis, hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan solusi untuk konteks lokal, tetapi juga menawarkan wawasan yang relevan bagi partai politik lainnya dalam menghadapi tantangan electoral di masa mendatang.

Dari sudut pandang teori politik, fenomena ini dapat dianalisis menggunakan pendekatan institusional partai. Teori ini menyoroti bagaimana struktur kelembagaan, norma, dan aturan internal partai memengaruhi kinerja dan stabilitasnya (Sartori, 2005). Selain itu, teori sistem partai dan teori representasi politik juga relevan dalam memahami bagaimana PPP sebagai partai berbasis ideologi agama beradaptasi dengan dinamika sosial-politik di Jawa Barat. Misalnya, menurut Lipset dan Rokkan (1967), partai berbasis agama cenderung mengalami kesulitan ketika menghadapi perubahan sosial yang signifikan, seperti urbanisasi dan modernisasi, yang menggeser preferensi politik masyarakat.

Kesenjangan yang teridentifikasi dalam penelitian ini terletak pada perbedaan antara harapan dan kenyataan. Secara ideal, PPP seharusnya mampu memanfaatkan keunggulan historis dan identitas ideologisnya untuk tetap relevan di tengah masyarakat. Namun, kenyataannya, partai ini justru gagal memahami dan merespons kebutuhan serta preferensi pemilih di Jawa Barat. Hal ini terlihat dari rendahnya efektivitas komunikasi politik dan kurangnya daya tarik program yang

ditawarkan, yang menyebabkan basis massa tradisional PPP beralih ke partai-partai lain yang lebih sesuai dengan aspirasi mereka (Putri, 2020).

Selain itu, analisis terhadap literatur terkait menunjukkan bahwa permasalahan ini bukan hanya unik bagi PPP, tetapi juga dialami oleh partai-partai kecil lainnya di Indonesia. Hal ini dapat disimpulkan bahwa ambang batas parlemen sering kali menjadi hambatan bagi partai-partai kecil untuk mendapatkan representasi politik yang layak. Penelitian Rahat dan Gideon (2009) bahkan menunjukkan bahwa dalam sistem representasi proporsional, penerapan *parliamentary threshold* yang tinggi cenderung menyederhanakan sistem kepartaian tetapi mengurangi pluralitas politik. Temuan ini memberikan konteks yang lebih luas bahwa tantangan yang dihadapi PPP juga terkait dengan kebijakan ambang batas yang diterapkan di Indonesia.

Tabel 1. 1 Rekapitulasi Perolehan Suara DPR RI Fraksi PPP Hasil Pemilu 2019 Di Provinsi Jawa Barat

(Sumber: <https://pemilu2019.kpu.go.id/pilegdpr/rekapitulasi>)

No	Kabupaten / Kota	Perolehan Suara PPP 2019
1	Kab. Bandung	50.126
2	Kab. Bandung Barat	27.084
3	Kab. Bekasi	64.719
4	Kab. Bogor	184.387
5	Kab. Ciamis	49.021
6	Kab. Cianjur	47.450
7	Kab. Cirebon	70.517
8	Kab. Garut	119.473
9	Kab. Indramayu	32.406
10	Kab. Karawang	20.208
11	Kota Bandung	15.592

12	Kota Banjar	6.738
13	Kota Bekasi	22.374
14	Kota Bogor	34.180
15	Kota Cimahi	5.739
16	Kota Cirebon	4.397
17	Kota Depok	18.673
18	Kota Sukabumi	9.970
19	Kota Tasikmalaya	55.431
20	Kab. Kuningan	52.463
21	Kab. Majalengka	86.450
22	Kab. Pangandaran	17.119
23	Kab. Purwakarta	10.446
24	Kab. Subang	27.894
25	Kab. Sukabumi	93.306
26	Kab. Sumedang	81.008
27	Kab. Tasikmalaya	123.522
Total		1.310.336
Persentase		4,98%

Tabel 1. 2 Rekapitulasi Perolehan Suara DPR RI Fraksi PPP Hasil Pemilu 2024
Di Provinsi Jawa Barat

(Sumber: <https://pemilu2024.kpu.go.id/pilegdpr/rekapitulasi>)

No	Kabupaten / Kota	Perolehan Suara PPP 2024
1	Kab. Bandung	44.434
2	Kab. Bandung Barat	23.797
3	Kab. Bekasi	56.589
4	Kab. Bogor	168.963
5	Kab. Ciamis	43.548
6	Kab. Cianjur	41.469
7	Kab. Cirebon	63.372
8	Kab. Garut	109.010
9	Kab. Indramayu	28.737
10	Kab. Karawang	18.582
11	Kota Bandung	13.987
12	Kota Banjar	5.637
13	Kota Bekasi	19.889
14	Kota Bogor	30.697
15	Kota Cimahi	5.315
16	Kota Cirebon	3.691
17	Kota Depok	16.857
18	Kota Sukabumi	8.912
19	Kota Tasikmalaya	49.962
20	Kab. Kuningan	47.211
21	Kab. Majalengka	77.953
22	Kab. Pangandaran	15.796
23	Kab. Purwakarta	9.153
24	Kab. Subang	25.153
25	Kab. Sukabumi	84.617

26	Kab. Sumedang	72.376
27	Kab. Tasikmalaya	112.113
Total		1.197.820
Persentase		4,56%

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan elemen fundamental dalam sistem demokrasi modern yang memberikan ruang partisipasi kepada rakyat untuk menentukan arah politik dan pemerintahan negara. Dalam sistem politik Indonesia yang menganut sistem multipartai, pemilu menjadi arena kompetitif bagi partai-partai politik dalam merebut legitimasi dan dukungan dari masyarakat melalui perolehan suara yang cukup untuk memperoleh kursi di parlemen (Muhaimin., 2024). Oleh karenanya, setiap partai politik dituntut untuk memiliki strategi politik yang adaptif, dinamis, dan responsif terhadap perubahan perilaku pemilih serta perkembangan isu-isu nasional maupun lokal.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai salah satu partai politik berbasis Islam yang memiliki sejarah panjang dalam perpolitikan Indonesia, menghadapi tantangan berat dalam menjaga keberlanjutan eksistensinya di tengah fragmentasi dukungan politik yang kian kompleks. Sejak berdiri pada tahun 1973, PPP telah mengalami berbagai fase transformasi, baik dari sisi struktur organisasi, kepemimpinan, maupun basis massa. Salah satu indikator penting dalam menilai daya saing partai adalah melalui pencapaian perolehan suara dalam pemilu legislatif, khususnya dalam konteks regional seperti Provinsi Jawa Barat.

Jawa Barat merupakan provinsi strategis dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang sangat besar, mencapai lebih dari 35 juta jiwa pada Pemilu 2024. Karakteristik pemilih di provinsi ini sangat beragam, dengan kombinasi antara masyarakat perkotaan dan pedesaan, kelompok santri dan modernis, serta spektrum ideologis yang terbentang dari nasionalis hingga religius. Dalam konteks ini, PPP memiliki potensi besar untuk mengkonsolidasikan suara, terutama di daerah-daerah

yang secara historis memiliki keterkaitan kuat dengan pesantren, organisasi keagamaan tradisional, serta kultur Islam moderat.

Pada Pemilu Legislatif 2019, PPP mencatatkan perolehan suara yang cukup signifikan di Jawa Barat dengan total 1.310.336 suara yang tersebar di seluruh 27 kabupaten/kota. Beberapa wilayah bahkan memberikan kontribusi suara yang sangat besar, seperti Kabupaten Bogor (184.387 suara), Kabupaten Tasikmalaya (123.522 suara), dan Kabupaten Garut (119.473 suara). Rata-rata perolehan suara PPP per kabupaten/kota pada tahun tersebut mencapai ± 49.285 suara, dengan persentase kontribusi rata-rata sebesar 3,76% terhadap total suara PPP di provinsi ini. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2019, PPP masih memiliki kekuatan elektoral yang relatif stabil dan tersebar merata di berbagai wilayah.

Namun, pada Pemilu tahun 2024, PPP mengalami penurunan dukungan suara yang cukup signifikan di Jawa Barat. Berdasarkan data resmi KPU, total suara PPP hanya mencapai 1.197.820 suara, atau mengalami penurunan sekitar 112.516 suara dari hasil tahun 2019. Penurunan ini berdampak langsung pada capaian nasional PPP yang gagal melampaui ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) sebesar 4%. Jika diuraikan lebih lanjut, penurunan suara terjadi hampir merata di semua wilayah kabupaten/kota. Kabupaten Bogor, sebagai daerah dengan perolehan suara tertinggi pada 2019, menurun sebesar 15.424 suara, disusul Kabupaten Tasikmalaya (11.409 suara) dan Kabupaten Garut (10.463 suara). Bahkan di beberapa wilayah kota seperti Kota Cimahi, Kota Cirebon, dan Kota Banjar, jumlah suara PPP berada di bawah angka 7.000 suara.

Fenomena menurunnya perolehan suara PPP ini memunculkan pertanyaan krusial mengenai faktor-faktor yang melatarbelakanginya. Apakah penurunan ini disebabkan oleh perubahan perilaku pemilih yang semakin kritis terhadap platform ideologis berbasis agama atau apakah akibat ketidakmampuan partai dalam menjangkau pemilih muda dan pemilih rasional yang lebih menekankan pada isu-isu aktual seperti transparansi, antikorupsi, dan representasi kepentingan lokal.

Dalam dinamika kontestasi politik modern, keberhasilan partai dalam mengelola komunikasi politik, memperkuat basis konstituen, serta membangun struktur organisasi yang solid menjadi sangat penting untuk menjaga kesinambungan elektoral. Selain itu, tantangan internal seperti minimnya regenerasi kader, lemahnya kepemimpinan daerah, serta fragmentasi dalam tubuh partai turut berkontribusi terhadap merosotnya dukungan masyarakat. Banyak struktur partai di tingkat kabupaten/kota yang tidak mampu menjalankan fungsi rekrutmen dan kaderisasi secara optimal, sehingga kehilangan daya tarik di tengah pemilih milenial dan Gen-Z yang cenderung lebih pragmatis dan independen dalam memilih partai politik (Argiana, 2025).

Penurunan suara PPP di Jawa Barat menjadi cerminan dari tantangan yang lebih luas di tingkat nasional. Partai politik tidak hanya dituntut untuk mempertahankan basis tradisionalnya, tetapi juga harus mampu beradaptasi dengan dinamika demografis dan teknologi informasi yang membentuk cara baru dalam berpolitik. PPP sebagai partai berbasis Islam menghadapi dilema antara mempertahankan identitas ideologisnya atau bertransformasi ke arah partai yang lebih inklusif dan modern.

Penting untuk mengkaji strategi politik PPP dalam menghadapi kegagalan melampaui ambang batas parlemen pada Pemilu 2024, khususnya di Provinsi Jawa Barat. Kajian ini akan berfokus pada dinamika penurunan perolehan suara, respons partai terhadap tantangan tersebut, serta langkah-langkah yang diambil dalam mengonsolidasikan kembali kekuatan politiknya di tingkat daerah. Dengan pendekatan yang bersifat deskriptif dan analitis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis dalam kajian partai politik serta menawarkan rekomendasi strategis yang aplikatif bagi PPP dan partai lain yang menghadapi tantangan serupa (Ari, Hasibuan, 2025).

Dari perspektif logis, pemilihan masalah ini menjadi menarik karena tidak hanya relevan dengan kepentingan akademis tetapi juga penting bagi

pengembangan strategi politik yang lebih inklusif dan adaptif di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dengan memperkaya literatur mengenai strategi politik partai berbasis ideologi agama. Di sisi lain, dari sudut pandang praktis, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang konkret bagi PPP dalam meningkatkan efektivitas strategi politiknya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bermanfaat bagi pengembangan ilmu politik, tetapi juga memiliki implikasi langsung bagi upaya penguatan demokrasi di Indonesia (Kholis, 2024).

Secara khusus, penelitian ini akan mengeksplorasi strategi politik yang digunakan oleh PPP dalam menghadapi persaingan di Provinsi Jawa Barat selama Pemilu 2024. Fokus utama adalah pada bagaimana partai ini memanfaatkan komunikasi politik, mobilisasi basis massa, dan respons terhadap isu-isu lokal untuk meningkatkan perolehan suara. Penelitian ini juga akan mengevaluasi kelemahan dan kekuatan dari strategi yang diterapkan, serta mengidentifikasi langkah-langkah strategis yang perlu diambil oleh PPP untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada.

Akhirnya, penelitian ini berupaya untuk menjawab pertanyaan mendasar mengenai bagaimana PPP dapat meningkatkan elektabilitasnya di masa mendatang. Mengingat pentingnya Jawa Barat sebagai salah satu basis suara utama dalam Pemilu Indonesia, keberhasilan atau kegagalan PPP di wilayah ini akan memiliki dampak signifikan terhadap kelangsungan partai tersebut di kancah politik nasional. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya relevan secara akademis tetapi juga memiliki nilai strategis bagi kepentingan demokrasi dan pembangunan politik di Indonesia (Buehler & Nataatmadja, 2019).

Dengan demikian, judul yang diusulkan untuk penelitian ini adalah **“Analisis Faktor Penyebab Gagal Lolosnya *Parliamentary Threshold* Partai Persatuan Pembangunan Pada Pemilihan Umum 2024: Respons Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Jawa Barat”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana strategi politik yang digunakan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam menghadapi persaingan politik di Provinsi Jawa Barat pada Pemilu 2024?
2. Bagaimana efektivitas komunikasi politik dan mobilisasi basis massa yang dilakukan PPP dalam meningkatkan elektabilitasnya di tengah dinamika sosial-politik Jawa Barat?
3. Bagaimana langkah strategis yang dapat diterapkan PPP untuk mengatasi kelemahan strategi politiknya agar mampu lolos ambang batas parlemen pada pemilu mendatang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menggambarkan strategi politik yang digunakan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam menghadapi persaingan politik di Provinsi Jawa Barat pada Pemilu 2024.
2. Untuk menilai efektivitas komunikasi politik dan mobilisasi basis massa yang dilakukan PPP dalam meningkatkan elektabilitasnya di tengah dinamika sosial-politik Jawa Barat.
3. Untuk mengidentifikasi langkah-langkah strategis yang dapat diterapkan PPP guna mengatasi kelemahan strategi politiknya dan mencapai ambang batas parlemen pada pemilu mendatang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ilmu politik, khususnya terkait strategi partai politik dalam menghadapi tantangan *parliamentary threshold*. Hasil penelitian ini juga

diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai peran komunikasi politik dan mobilisasi massa dalam meningkatkan elektabilitas partai berbasis agama.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat membantu para pengambil kebijakan di PPP untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan strategi politik yang telah diterapkan. Hal ini bertujuan agar partai dapat lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga dapat berkompetisi secara efektif di masa mendatang dan mendukung keberlanjutan sistem demokrasi di Indonesia.

E. Kerangka Berpikir

Kerangka penelitian ini menggunakan teori institusional partai untuk menganalisis strategi PPP dalam menghadapi tantangan *parliamentary threshold* pada Pemilu 2024, khususnya di Jawa Barat. Teori ini menyoroti pentingnya struktur kelembagaan, norma, dan aturan dalam membentuk strategi partai. Sebagai partai berbasis ideologi agama, PPP menghadapi tantangan besar dalam menjaga relevansi dan elektabilitasnya di tengah dinamika politik yang terus berubah.

Pendekatan ini menggabungkan teori sistem partai dan teori representasi politik. Teori sistem partai menjelaskan bagaimana struktur politik dan hubungan antarpartai memengaruhi peluang partai kecil seperti PPP untuk tetap kompetitif, terutama dalam sistem representasi proporsional dengan ambang batas parlemen yang sering menjadi hambatan. Sementara itu, teori representasi politik menyoroti peran partai sebagai penghubung antara kebutuhan masyarakat dan kebijakan pemerintah.

Penelitian ini menganalisis faktor penyebab kegagalan PPP melalui tiga dimensi utama: komunikasi politik, mobilisasi basis massa, dan stabilitas struktural-fungsional partai. Komunikasi politik menjadi elemen kunci dalam menjalin hubungan dengan konstituen. Namun, pendekatan berbasis nilai-nilai

agama yang menjadi ciri khas PPP tampak kurang efektif di tengah perubahan preferensi pemilih yang semakin pragmatis dan modern.

Mobilisasi basis massa merupakan aspek penting dalam efektivitas strategi PPP. Hal ini meliputi penggalangan dukungan pemilih dan pembangunan kepercayaan serta loyalitas melalui program yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Partai-partai kecil kerap kesulitan memobilisasi massa secara efektif, sehingga elektabilitasnya menurun, terutama di wilayah strategis seperti Jawa Barat.

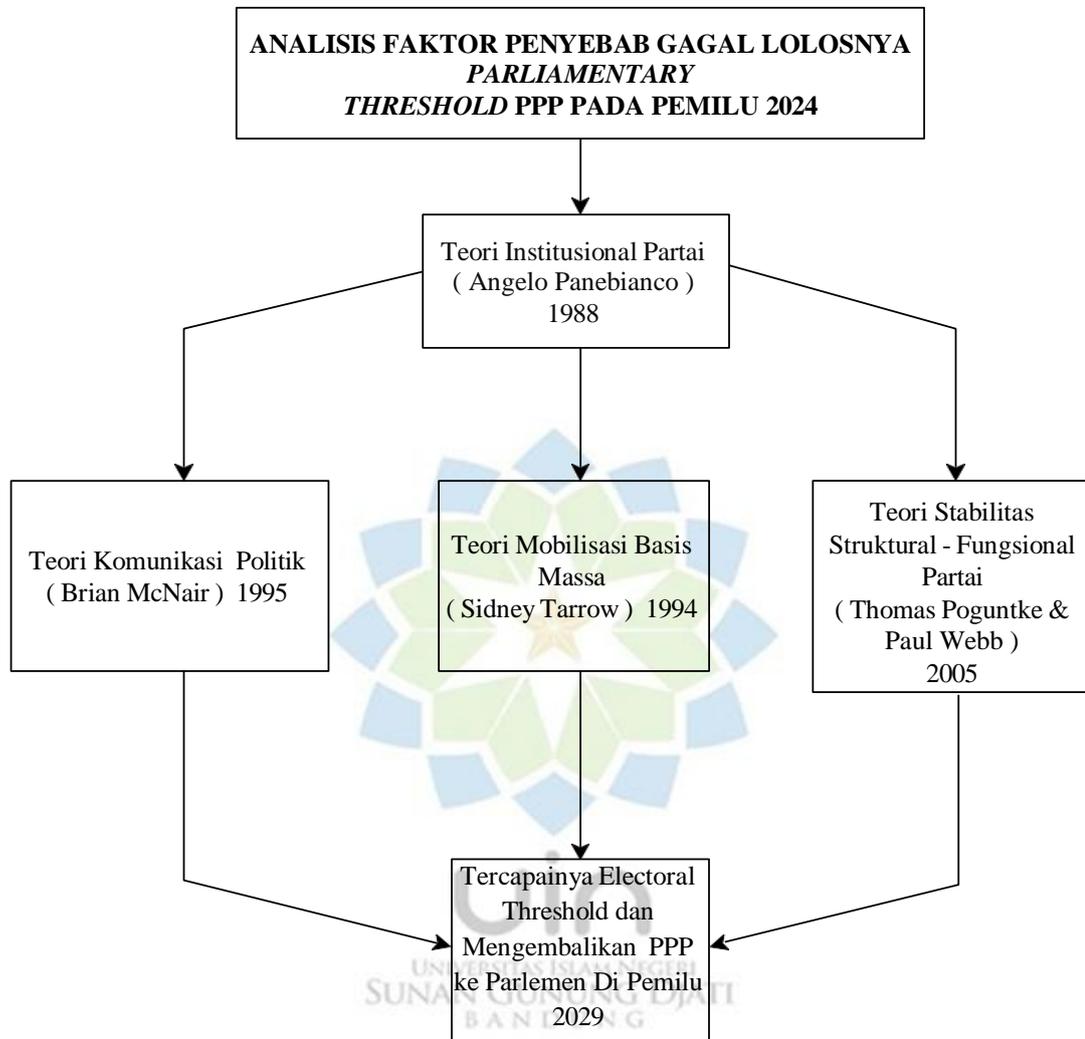
Kerangka berpikir ini juga mempertimbangkan dinamika sosial-politik lokal sebagai variabel penting. Di Jawa Barat, perubahan demografi dan urbanisasi menciptakan tantangan baru bagi PPP. Perubahan ini mendorong pergeseran perilaku pemilih yang lebih condong pada partai besar atau partai yang dianggap mampu memenuhi kebutuhan praktis mereka. Kerangka teori ini kemudian diterjemahkan ke dalam definisi operasional untuk mengidentifikasi indikator-indikator utama yang relevan dengan penelitian. Dalam pendekatan kualitatif ini, indikator seperti efektivitas komunikasi politik, keberhasilan mobilisasi massa, dan relevansi program partai akan diobservasi dan dianalisis untuk mengevaluasi kegagalan PPP. Observasi akan dilakukan melalui wawancara mendalam dengan para pengurus partai serta analisis dokumen-dokumen terkait.

Penelitian ini juga mengadopsi kerangka penalaran logis untuk menjelaskan hubungan antara fenomena yang diamati. Misalnya, jika komunikasi politik dianggap tidak efektif, peneliti akan menggali lebih jauh untuk menemukan penyebabnya, seperti kurangnya penggunaan teknologi informasi atau lemahnya koordinasi internal partai. Hubungan ini digambarkan dalam skema sistematis yang menunjukkan bagaimana berbagai variabel saling berinteraksi dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan PPP. Oleh karenanya, kerangka berpikir penelitian ini berfungsi sebagai panduan yang tidak hanya mendasari pengumpulan data tetapi juga membantu mensistematisasikan analisis. Kerangka ini memungkinkan

penelitian berjalan dengan fokus yang jelas dan menghasilkan temuan yang relevan baik secara akademis maupun praktis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru tentang strategi politik partai berbasis agama di Indonesia dan bagaimana mereka dapat beradaptasi dengan tantangan di era modern.



Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir Penelitian



Kerangka berpikir penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam menghadapi kegagalan melampaui ambang batas parlemen pada Pemilu 2024 di Provinsi Jawa Barat. Kerangka ini dimulai dari pemahaman bahwa keberhasilan PPP dalam mencapai ambang batas sangat bergantung pada sinergi berbagai elemen kunci, yaitu strategi politik, mobilisasi basis massa, komunikasi politik, institusionalisasi partai, serta stabilitas struktural-fungsional partai. Semua elemen ini saling mendukung untuk menghadapi tantangan utama yang diidentifikasi sebagai penyebab kegagalan,

yaitu krisis elektabilitas PPP di Jawa Barat, perubahan preferensi masyarakat terhadap partai, serta kurangnya koordinasi di lingkup internal partai.

Strategi politik PPP merupakan elemen utama yang mencakup langkah-langkah inovatif untuk memperbaiki posisi partai di mata publik. Strategi ini mencakup reposisi ideologi, program kampanye yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, serta inovasi dalam pendekatan terhadap pemilih. Untuk mendukung strategi ini, mobilisasi basis massa menjadi hal yang esensial. Mobilisasi dilakukan dengan menggerakkan pemilih tradisional PPP, khususnya di Jawa Barat, melalui kegiatan sosial, kampanye berbasis komunitas, dan pendekatan yang lebih personal. Dalam hal ini, efektivitas komunikasi politik memainkan peran penting. PPP harus mampu menyampaikan pesan politiknya secara jelas, menggunakan saluran komunikasi yang relevan, termasuk media digital, untuk menjangkau pemilih muda dan pemilih tua. Selain itu, penguatan institusional partai menjadi aspek krusial dalam strategi politik PPP. Institusionalisasi yang baik membantu partai mengatasi konflik internal, meningkatkan koordinasi antar kader, dan memperkuat integritas organisasi. Stabilitas struktural-fungsional partai juga menjadi landasan penting bagi keberhasilan strategi ini. Dengan stabilitas yang terjaga, partai dapat berfungsi secara optimal dalam artikulasi dan agregasi kepentingan masyarakat, sekaligus menjaga soliditas di tengah persaingan politik yang ketat.

Kerangka berpikir ini juga menyoroti tiga faktor utama yang menjadi penyebab kegagalan PPP dalam Pemilu 2024, yaitu krisis elektabilitas di Jawa Barat, perubahan preferensi masyarakat yang tidak lagi melihat PPP sebagai pilihan utama, dan lemahnya koordinasi internal partai. Dengan memahami akar permasalahan ini, strategi politik PPP diarahkan untuk menyelesaikan tantangan tersebut dan pada akhirnya mencapai tujuan akhir, yaitu tercapainya ambang batas parlemen. Kerangka berpikir ini tidak hanya memberikan gambaran tentang kompleksitas tantangan yang dihadapi PPP, tetapi juga menjadi panduan untuk merumuskan rencana aksi yang strategis dan efektif.